

PERAN BUPATI DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN JALAN DI KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

Oleh : Wiwi Silfia Djabar

ABSTRACT

Peran kepala daerah sangat menentukan daerah yang di pimpinnya agar lebih baik lagi dan dapat meningkatkan pembangunan daerah untuk kedepannya. Dari peran bupati Ir. H.M. AL Yasin, Ali. M.MT pada tahun 2007 perlahan-lahan membangun infrastruktur kabupaten Halmahera tengah yang dalam waktu lima tahun.

Dalam waktu lima tahun tersebut kesuksesan Bupati dalam meningkatkan pembangunan daerahnya di Kabupaten Halmahera Tengah sudah terbukti dengan dana APBD yang hanya 300 Miliar beliau dapat membangun daerah ini lebih berkembang dari tahun sebelumnya. Tetapi dalam kenyataan masih ada permasalahan jalan yang belum terselesaikan.

Dari hasil penelitian mengenai peran bupati dalam meningkatkan pembangunan jalan di kabupaten Halmahera Tengah, bisa dilihat dengan pembangunan jalan yang ada di kecamatan dan desa yang semakin membaik dari tahun ke tahunnya.

Kata Kunci : Peran, Bupati, Pembangunan

PENDAHULUAN

Kepala daerah adalah kepala pemerintah yang dipilih secara demokratis. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan bertanggung jawab serta menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan ketentuan daerah yang lainnya.

Peran kepala daerah sangat menentukan daerah yang di pimpinnya agar lebih baik lagi dan dapat meningkatkan pembangunan daerah untuk kedepannya. Dari peran bupati Ir. H.M. AL Yasin, Ali.M.MT pada tahun 2007 perlahan-lahan membangun infrastruktur kabupaten Halmahera tengah yang dalam waktu lima tahun.

Dalam waktu lima tahun tersebut kesuksesan Bupati dalam meningkatkan pembangunan daerahnya di Kabupaten Halmahera Tengah sudah terbukti dengan dana APBD yang hanya 300 Miliar beliau dapat membangun daerah ini lebih berkembang dari tahun sebelumnya. Tetapi dalam kenyataan masih ada permasalahan jalan yang belum terselesaikan.

Di lihat dari kondisi jalan pada tahun 2010 Kabupaten Halmahera Tengah masih 45 % yang rusak berat dan 60 persen rusak ringan. Kemudian di tahun 2011-2012 ada peningkatan yang lebih baik dari tahun lalu dengan 24 % rusak sedang, 20 % rusak ringan dan 7 % rusak berat.. Tetapi sampai sekarang belum juga ada kebijakan dari pemerintah daerah untuk menyelesaikan permasalahan jalan.

Itu sebabnya saya mengangkat topik dengan judul Peran Bupati dalam Meningkatkan Pembangunan Daerah di Kabupaten Halmahera Tengah.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Peran Bupati dalam meningkatkan pembangunan jalan tahun 2011-2012 di Kabupaten Halmahera Tengah.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (Moleong, 2000:3) penelitian kualitatif adalah “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”.

Menurut Strauss dan Corbin (2003) penelitian kualitatif dimaksud sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Selanjutnya, dipilihnya penelitian kualitatif karena kemantapan peneliti berdasarkan pengalaman penelitiannya dan metode kualitatif dapat memberikan rincian yang lebih kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif.

Fokus utama dalam penelitian ini yaitu pembangunan jalan di tahun 2011-2012 di Kabupaten Halmahera Tengah dari Dana APBD.

PEMBAHASAN

A. Peran Bupati dalam Meningkatkan Pembangunan Kabupaten Halmahera Tengah

Peran Bupati dalam meningkatkan pembangunan Kabupaten Halmahera Tengah yang dipimpinnya dengan peningkatan infrastrukturnya, Pengembangan kualitas sumber daya manusia, pengembangan ketenagakerjaan, bidang kesehatan dan sebagainya, untuk memajukan Kabupaten Halmahera Tengah. Peran Bupati sendiri bisa dilihat dari peningkatan dan kemajuan Kabupaten Halmahera Tengah ini setelah perpindahan ibu kota Kabupaten Halmahera Tengah dari Soasio ke Weda pada tahun 2008.

Dari hasil penelitian mengenai peran bupati dalam meningkatkan pembangunan jalan di kabupaten Halmahera Tengah, bisa dilihat dengan pembangunan jalan yang ada di kecamatan dan desa yang semakin membaik dari tahun ke tahunnya.

Jenis-jenis jalan menurut sistem, fungsi, status, dan kelas adalah sebagai berikut :

1. Sistem Jaringan Jalan

Sistem jaringan jalan merupakan satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hirarki.

Sistem jaringan jalan disusun dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan dengan memperhatikan keterhubungan antar kawasan atau dalam kawasan perkotaan, dan kawasan perdesaan.

❖ Sistem jaringan jalan primer

Sistem jaringan jalan primer disusun berdasarkan rencana tata ruang dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan sebagai berikut:

- menghubungkan secara menerus pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal sampai ke pusat kegiatan lingkungan; dan
- menghubungkan antarpusat kegiatan nasional.

❖ Sistem jaringan jalan sekunder

Sistem jaringan jalan sekunder disusun berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan yang menghubungkan secara menerus kawasan yang mempunyai fungsi primer, fungsi sekunder kesatu, fungsi sekunder kedua, fungsi sekunder ketiga, dan seterusnya sampai ke persil.

2. Jalan Umum Menurut Fungsi

Jalan umum menurut fungsinya dikelompokkan kedalam jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan.

❖ Jalan arteri

Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.

❖ Jalan kolektor

Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

❖ Jalan lokal

Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

❖ Jalan lingkungan

Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.

3. Jalan Umum Menurut Status

Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.

❖ Jalan nasional

Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.

❖ Jalan provinsi

Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.

❖ Jalan kabupaten

Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk dalam jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.

❖ Jalan kota

Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antara persil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota.

❖ Jalan desa

Jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.

4. Jalan Umum Menurut Kelas

Pengaturan kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan dikelompokkan atas bebas hambatan, jalan raya, jalan sedang, dan jalan kecil.

Menurut berat kendaraan yang lewat, jalan raya terdiri atas: Jalan Kelas I, Jalan Kelas II A, Jalan Kelas II B, Jalan Kelas II C, dan Jalan Kelas III.

Tebal perkerasan jalan itu ditentukan sesuai dengan kelas jalan. Makin berat kendaraan-kendaraan yang melalui suatu jalan, makin berat pula syarat-syarat yang ditentukan untuk pembuatan jalan itu.

- Kelas I
- Kelas II
- Kelas IIA
- Kelas IIB
- Kelas IIC
- Kelas III

B. Implementasi Kebijakan dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah secara umum dan secara khusus upaya peningkatan pembangunan jalan

Dilihat dari sarana Jaringan Jalan di Kabupaten Halmahera Tengah secara umum cukup bagus dimana kota-kota di pesisir pantai sudah terhubung melalui sarana transportasi darat. Sampai dengan tahun 2010 Kabupaten Halmahera Tengah mempunyai jalan aspal sepanjang 79,613 km dimana panjang jalan aspal terbesar terletak di ibukota kabupaten yaitu di kecamatan Weda sepanjang 24,824 km. Berikutnya berturut-turut adalah kecamatan Patani sepanjang 14,529 km, kecamatan Pulau Gebe sepanjang 20 km dan kecamatan Weda Selatan 13,260. Untuk kecamatan lainnya jaringan jalan yang ada terdiri dari jalan berkerikil dan jalan tanah.

Sedangkan untuk tahun 2011 jaringan jalan di Kabupaten Halmahera Tengah tersedia sepanjang 551,16 km yang terdiri dari jalan Negara 13,93 km, jalan provinsi 66,850 km, dan jalan kabupaten 471,380 km. Dari jaringan jalan tersebut di atas hingga sampai dengan akhir tahun 2011 jalan yang telah di aspal sepanjang 209,001 km dan jalan kerikil 294,605 km, jalan baik 461,351 km, dan jaringan jalan rusak 32,255 km.

Untuk tahun 2012 jalan hanya diprioritaskan untuk daerah-daerah tertentu karena daerah tersebut untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memberikan kemudahan akses yang berada pada kawasan antar Negara.

C. Faktor-Faktor Penghambat Pembangunan Jalan

Dampak dari keterbatasan dari anggaran ini membuat pencapaian target pembangunan jalan tidak maksimal seperti kurangnya sarana prasarana pendukung pembangunan jalan.

Apa sebab Dana APBD untuk pembangunan jalan ini terbatas karena APBD terbagi atas Belanja Publik 40%, dan Belanja Modal 60 %. Belanja Modal ini termasuk didalamnya dana untuk pembangunan jalan. Belanja modal sebanyak 60 % ini merupakan bagian dari peningkatan pembangunan jalan, jembatan, pertanian, perikanan dan sebagainya.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dibahas di pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- ❖ Peran Bupati Halmahera Tengah sudah ada peningkatan dari tahun 2010-2012 ini dengan pembangunan infrastruktur seperti Pembangunan Jalan, Jembatan, Rumah sakit, Perumahan PNS dan sebagainya
- ❖ Adanya keperdulian dari Bupati untuk memajukan Kabupaten Halmahera Tengah, khususnya programnya untuk pembangunan jalan di Kabupaten yang tahun sebelumnya 2010 masih 45% yang rusak berat sedangkan untuk tahun 2011-2012 yang rusak berat sisa 7 % saja ada peningkatan dari tahun sebelumnya. Peranya yaitu dengan menambah/meningkatkan anggaran pembangunan jalan di Kabupaten Halmahera Tengah
- ❖ Keberhasilan Bupati dengan dijalankannya program-program pembangunan dan ketidakberhasilannya dengan masih adanya program-program yang belum dijalankan semuanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Abu H. Drs. 2007. *Psikologi Sosial*. Rineka Cipta: Jakarta
Ateng Syarifudin H. 1994. *Kepala Daerah*, PT Citra Aditya Bhakti : Jakarta
Horton, Paul B., L.Hunt, Chester. 1999.*Sosiologi*.Erlangga : Jakarta
Lasut E. Elly Dr. 2007.*Komitmen Membangun kabupaten Kepulauan Talaud*. Manado
Lemhannas. 1997. *Pembangunan Nasional*, PT. Balai Pustaka Lemhannas : Jakarta
Moleong Lexy J. 1989.*Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remadja Karya : Bandung -----
----- 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rosda Karya : Bandung
----- 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*: Rosdakarya : Bandung
Sarundajang S.H Dr. 2011. *Birokrasi Dalam Otonomi Daerah*. Kata Hasta Pustaka : Jakarta
Sanit Arbit Drs. 2003.*Sistem politik Indonesia*, PT Raja Gafindo Persada :Jakarta
Sumadi Suryabrata. 2008. *Metodologi Penelitian*.Jakarta: RajaGrafindo Persada
Uma Sekaran. 2006. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Salemba Empat : Jakarta
Kaho Riwu JosefDrs. 2010, *Prospek otonomi daerah*, PT Raja Grafindo Persada : Jakara

Sumber-Sumber Lain

- Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999
Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 25 dan pasal 27
PP Nomor 8 tahun 2008
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 5 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Bab VII Pasal 150
Ayat (1)